

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Magang II Mahasiswa/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang selama 3 bulan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan penerapan pelayanan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, mulai dari kegiatan administrasi, pelaksanaan pengujian, baik persyaratan teknis dan laik jalan, hingga proses pengesahan dan penerbitan bukti lulus uji.
2. Fasilitas yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sudah cukup lengkap, namun pada bagian gedung uji, ukuran gedung belum memenuhi standar, karena ketika kendaraan kereta gandengan dan tempelan memasuki gedung uji masih mengalami kesulitan saat akan masuk. Ukuran tinggi pintu masuk gedung uji pun perlu ditambah, karena beberapa kendaraan truk muatan tertutup terkendala ketika akan masuk gedung uji.
3. Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sudah cukup baik, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) perlu ditambahkan kaca mata keselamatan (*safety glasses*) dan penutup telinga (*ear plug*). Warna lantai uji kendaraan bermotor juga belum menggunakan penerapan K3 yang sesuai.

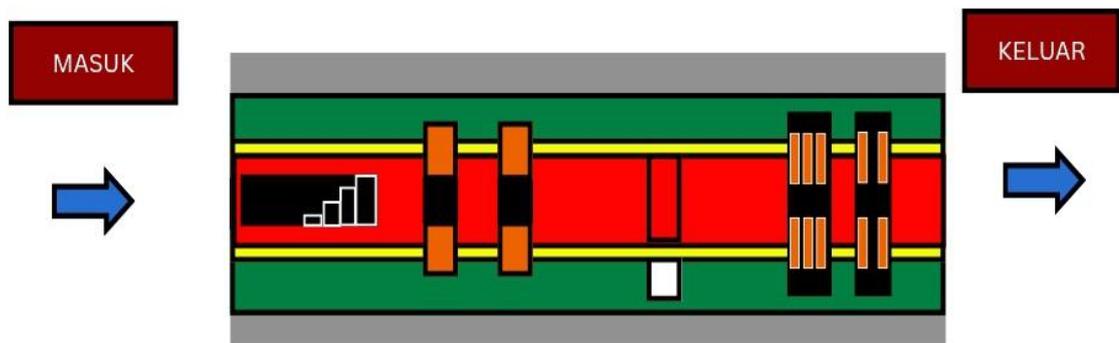
V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Penulis menyarankan:

1. Melakukan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan memberikan contoh kasus kejadian kecelakaan sebagai akibat dari kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala. Hal ini bertujuan

untuk meminimalisasi kejadian kecelakaan yang ditengarai oleh kerusakan pada komponen kendaraan guna meningkatkan keselamatan di jalan.

2. Upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang, perlu dilakukan renovasi gedung uji berupa pelebaran lahan dan tinggi gedung sehingga pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan optimal. Selain itu juga diperlukan perbaikan kolong uji yang selalu tergenang air untuk memaksimalkan pemeriksaan pra uji kendaraan pada bagian bawah kendaraan.
3. Tata letak penempatan alat uji perlu dilakukan perbaikan karena jarak antar alat uji yang terlalu berdekatan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi mekanisme dan hasil pengujian yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan posisi alat uji *side slip* yang terlalu dekat dengan alat *axle load*.
4. Melakukan pewarnaan ulang pada lantai uji sesuai dengan penerapan K3 yang telah ditentukan. Warna lantai kerja yang sesuai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) berdasarkan dengan kode warna standar yaitu:
 - a. Putih : Area umum
 - b. Merah : Area bahaya
 - c. Hijau : Jalur aman
 - d. Kuning : Zona peringatan



Gambar V.1 Pewarnaan lantai

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, A., Sipahutar, M.K. and Zainul, L.M. (2024) 'Analisis Penerapan Smk3 Pada Proyek Rdmp Ru-V Balikpapan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Pt Rekayasa Industri', 10(2), pp. 403–409.
- Darmayani, S. *et al.* (2023) *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat.*
- Jeverson Simamora (2023) 'Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia', *Lex Aeterna Law Journal*, 1(3), pp. 188–198. Available at: <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i3.27>.
- Mareta, F.C. and Fakhri, F. (2024) 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), pp. 231–240. Available at: <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>.
- Meikaharto, R.B.R., Setyaningsih, E. and Candra, H. (2021) 'Alat Kalibrasi Sound Level Meter Berbasis Mikrokontroler', *Jetri: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 18(2), pp. 105–118. Available at: <https://doi.org/10.25105/jetri.v18i2.7376>.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2021) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor', *Kementerian Perhubungan.*
- Putri, E.H. and Ginting, F.A. (2023) 'Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi Kasus tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Primissima Kabupaten Sleman)', *Jurnal Enersia Publika*, 7(1), pp. 37–55. Available at: https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/1549.
- Rahmatullah, H.G. *et al.* (2023) 'Sosialisasi Alat Pelindung Diri pada Pekerja Repair di PT. X', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), pp. 2971–2975.
- Rohman, A. and Hanafi, Y. (2019) 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Reformasi*, 9(2), p. 153. Available at: <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.
- Sarbiah, A. (2023) 'Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Karyawan', *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(2), pp. e1210–e1210.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2021) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor', Kementerian Perhubungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jakarta

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Nomor : 067/3793/08/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DJRD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor